

**PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERBANKAN**



TUGAS AKHIR / SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Wiwik Dian Wikanti

40011420650069

PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)

AKUNTANSI PERPAJAKAN

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Wiwik Dian Wikanti
Nomor Induk Mahasiswa : 40011420650069
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir / Skripsi : Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap
Penghindaran Pajak Dan Koneksi Politik Sebagai
Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Perbankan

Semarang, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Mutiara Tresna Parasetya.,

S.E., M.Si, Akt

NIP. 198810062018032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Wiwik Dian Wikanti
Nomor Induk Mahasiswa : 40011420650069
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir / Skripsi : Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap
Penghindaran Pajak Dan Koneksi Politik Sebagai
Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Perbankan

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

1. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si.Ak
2. Apip, S.E., M.Si
3. Maya Aresteria, S.E., M.Si.Ak


(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR / SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wiwik Dian Wikanti menyatakan bahwa tugas akhir / skripsi dengan judul Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Dan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Wiwik Dian Wikanti'.

Wiwik Dian Wikanti

40011420650069

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial menggunakan dana pengeluaran sosialnya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah koneksi politik memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data didapatkan dari *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi masing-masing perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 53 dari tahun 2019 hingga 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi yang datanya diolah menggunakan *software* SPSS versi 25.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran CSR perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini mendukung teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dimana semakin baik citra perusahaan dimata masyarakat maka kecil kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik melemahkan peran CSR terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan politik membuat perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat cenderung menjadi lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik yang lemah bertanggung jawab secara sosial dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ikatan politik yang kuat.

Kata kunci : penghindaran pajak, tanggung jawab sosial, koneksi politik, efek moderasi, industri perbankan

ABSTRACT

This research aims to find out whether socially responsible companies use their social expenditure funds to carry out tax avoidance practices. This research also examines whether political connections moderate the relationship between social responsibility and tax avoidance.

The population used in this research is banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2021. This research uses secondary data where data is obtained from the Indonesian Stock Exchange website and the official website of each banking sector company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019. 2019 to 2021. The total sample used in this research was 53 from 2019 to 2021. The analytical method used in this research was moderated regression analysis whose data was processed using SPSS version 25 software.

This research shows that the higher a company's CSR expenditure, the lower its level of tax avoidance. This supports the stakeholder theory where the better the company's image in the eyes of the public, the less likely it is to practice tax avoidance. This research also shows that political connections weaken the role of CSR on tax avoidance. This implies that political connections make politics make companies socially irresponsible. Companies with strong political connections tend to be more aggressive in carrying out tax avoidance practices. Companies with weak political connections are more socially responsible than companies with strong political ties.

Key words: *tax avoidance, social responsibility, political connections, moderation effect, banking industry*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Dan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Perbankan dengan sebaik baiknya tanpa ada halangan yang berarti. Penulisan tugas akhir/ skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat menyelesaikan Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Program Studi Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan tugas akhir/skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, saran, bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Ir.Budiyono, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Drs. Dul Muid., M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.
4. Mutiara Tersna Parasetya S.E., M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
5. Junaidi selaku ayah penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta arahan kepada penulis.
6. Sofiyatun selaku ibu penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis serta senantiasa menjadi pendengar dan pemberi saran yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
7. Silvy Nabila dan Ibrahim selaku adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

8. Habib Muhammad Mustofa bin Hasan Alaydrus selaku guru penulis yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, nasihat, serta doa kepada penulis.
9. Teman – teman ‘Reunited’ Anis, Sinta, Pipit, Salmaa yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan tugas akhir / skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun tugas akhir/skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran pembaca sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tugas akhir/skripsi ini.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Wiwik Dian Wikanti

NIM. 40011420650069

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR / SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	17
2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>).....	17
2.1.2 Penelitian Terdahulu	22
2.2 Kerangka Pemikiran	32
2.3 Hipotesis Penelitian	34
2.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.....	34
2.3.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab Sosial dengan Penghindaran Pajak	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

3.1 Definisi Operasional Variabel.....	38
3.1.1 Variabel Dependen.....	38
3.1.2 Variabel Independen	40
3.1.3 Variabel Moderasi	40
3.1.4 Variabel Kontrol.....	41
3.2 Populasi dan Sampel.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	47
3.5 Metode Analisis.....	47
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	48
3.5.2 Asumsi Klasik	48
3.5.3 Analisis Regresi Moderasi	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	54
4.2 Analisis Data.....	55
4.2.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.2.2 Hasil Uji Analisis Asumsi Klasik.....	59
4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi.....	66
4.3 Intrepretasi Hasil	68
4.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak	68
4.3.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab Sosial Dengan Penghindaran Pajak	69
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan	72
5.3 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Firma Audit Big 4.....	42
Tabel 4.1 Tahapan Seleksi Sampel Penelitian.....	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).....	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Metode Run Test.....	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Park	64
Tabel 4.6 Koefisien Regresi	65
Tabel 4.7 Model Summary Regresi Moderasi.....	66
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengujian.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Pajak	5
Gambar 1.2 Pendapatan Pajak Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram.....	59
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Normal P-P Plot	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Grafik Plot	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.....	76
LAMPIRAN II	77
LAMPIRAN III.....	78
LAMPIRAN IV	79
LAMPIRAN V	80
LAMPIRAN VI.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I dijelaskan dan diuraikan tentang gambaran umum penelitian. Pada bagian ini terdapat empat bahasan yang akan diuraikan yakni terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini juga tertulis dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah dengan melakukan pembangunan negara baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian nasional. Agar dapat melaksanakan program kerja tersebut dengan baik, pemerintah pasti membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Pembiayaan tersebut disusun dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sumber pendapatan negara dibagi menjadi tiga yakni pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pajak merupakan pendapatan negara yang

paling besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan penerimaan pajak memberikan peran yang penting dalam pembangunan sebuah negara. menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan digunakan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pendapatan negara yang memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) paling tinggi berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan negara tahun 2022 sektor perpajakan menyumbang 1.634,4 triliun atau setara dengan 110,06 persen dari total penerimaan negara. Penerimaan ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yang hanya menerima 1.231,87 triliun.

Pentingnya peran perpajakan dalam upaya pembangunan negara sehingga apabila terjadi penghindaran pajak dapat menimbulkan hambatan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara (Dewi, 2023). Penghindaran pajak kerap kali diartikan sebagai tindakan yang legal seperti halnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan penyelundupan atau penyelewengan pajak dianggap sebagai hal yang illegal karena melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Indonesia saat ini tengah bergelut dengan permasalahan perpajakan salah satunya adalah tarif pajak di Indonesia yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan tarif negara kelas menengah dan negara maju (Murtina, *et al.*, 2020). Tarif pajak di Indonesia masih berada diangka 11 persen, tarif tersebut tetinggal jauh dibanding negara kelas menengah yang memiliki tarif 14-15 persen dan negara maju yang memiliki tarif 24-26 persen. Tentunya, jika penghindaran pajak dapat diatasi dan institusi perpajakan dapat diperkuat, maka rasio pendapatan perpajakan diharapkan akan terjadi peningkatan.

Hampir di seluruh negara yang memiliki hubungan bisnis, penghindaran pajak selalu menjadi fokus utama termasuk di negara Indonesia. Penghindaran pajak menjadi masalah darurat yang harus segera diatasi. Perkiraanannya setiap tahun terdapat sekitar Rp. 110 triliun capaian besara penghindaran pajak di Indonesia. Mayoritas berasal dari badan usaha sebesar 80% dan sisanya berasal dari perseorangan (Himawan, 2017).

Penelitian ini berfokus pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor perbankan, karena bank dianggap sebagai jantung dan kunci dalam pertumbuhan ekonomi (Uddin *et al.*, 2018). Lembaga keuangan termasuk sektor perbankan merupakan sektor yang tergolong sering melakukan praktik penghindaran pajak (Fanggidae *et al.*, 2015). Modus penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan termasuk didalamnya adalah perbankan adalah menggunakan modus *agresive tax planning* atau

modus perencanaan pajak agresif. Modus ini dilakukan dengan cara perusahaan membuat laporan pembelanjaan yang besar serta diluar batas rasional dan seolah-olah memperlihatkan bahwa kondisi perusahaan sedang dalam keadaan rugi.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak sektor perbankan adalah kasus Bank Central Asia (BBCA). Bank BCA melakukan kasus penghindaran pajak dengan memanfaatkan keretakan peraturan perpajakan. Penghindaran tersebut dilakukan dengan membuat laporan belanja diluar batas wajar dan dinilai tidak masuk akal. Aksi ini didukung dengan menaikkan gaji serta tunjangan beberapa pegawai serta menyuapi pejabat-pejabat pajak. Kasus ini melibatkan oknum Direktorat Jendral Pajak, Hadi Purnomo pada tahun 2004-2006. Dari kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp. 375 Miliar (Simanjutak, 2014).

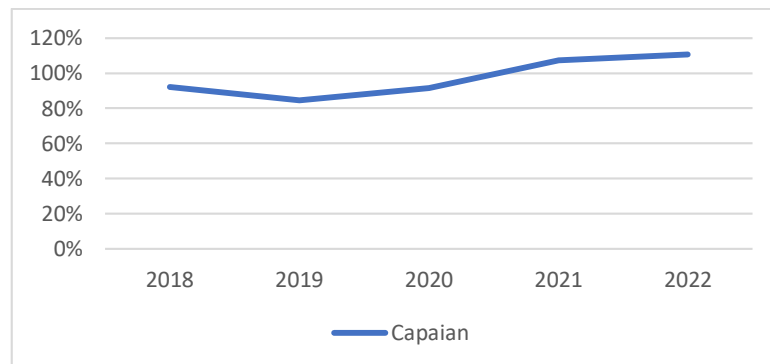
Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia dalam mengatasi masalah keuangan. Hal ini dilakukan dengan memberikan produk-produk keuangan seperti deposito maupun tabungan. Selain itu terdapat produk perbankan seperti kredit yang dapat membantu masyarakat dalam membiayai kehidupan. Menurut Direktur *Riset Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Pitter Abdullah, sektor perbankan memberikan peran penting dalam aspek ekonomi termasuk penggerak sektor PDB Indonesia.

Penggerak sektor ekonomi di Indonesia ada tiga yakni konsumsi, investasi, serta ekspor impor dan perbankan mengambil peran penting didalamnya.

Fenomena terkait dengan pengumpulan pajak di Indonesia mencerminkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari divisi perpajakan yang tinggi. Pendapatan tersebut nantinya digunakan agar bisa menaikkan laju perkembangan serta kemajuan suatu negara sehingga wajib digunakan dengan bijak sebagaimana mestinya. Realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi pendapatan pajak.

Gambar 1.1

Realisasi Pendapatan Pajak
(dalam triliun rupiah)

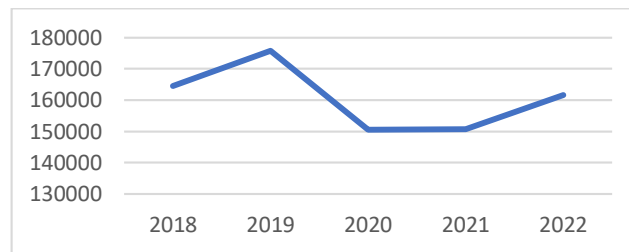


Sumber : data kemenkeu diolah

Pajak sektor perbankan merupakan bagian dari penerimaan pajak disektor jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2022 pendapatan pajak sektor jasa keuangan dan akuntansi menempati peringkat ke 3 teratas pendapatan pajak

nasional. Namun, walaupun menempati peringkat ke tiga teratas, pendapatan pajak sektor jasa keuangan dan asuransi sejak tahun 2020 mengalami penurunan. Berikut merupakan data pendapatan pajak sektor keuangan dan asuransi ditunjukkan pada gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2
Pendapatan Pajak Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



Berdasarkan gambar 1.2 tentang pendapatan pajak sektor jasa keuangan dan asuransi diatas diketahui bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Apabila dilihat pada gambar 1.2 realisasi pendapatan pajak mengalami peningkatan.

Dalam industri perbankan, penghindaran pajak dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan peluang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan hal yang sering dibahas dalam berbagai literatur akuntansi. Tanggung jawab sosial digunakan untuk memberikan kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan. Sebagaimana dalam pelaporannya tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, pilihan, motif, serta nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa

karakteristik tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Tindakan maupun keputusan yang diambil perusahaan acapkali dinilai membingungkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan komitmen perusahaan terhadap masyarakat. Meskipun perusahaan tidak bertanggung jawab langsung secara sosial, namun tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai sarana investasi dalam melakukan penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini tentunya didukung oleh koneksi politik dibelakangnya. Perusahaan dengan kebijakan tanggung jawab sosial yang proaktif cenderung dianggap kurang berpartisipasi dalam prosedur perpajakan yang agresif (Sikka, 2010). Meskipun demikian sebelum melakukan investasi, investor secara progresif menggunakan tanggung jawab sosial sebagai penunjang apakah akan menggunakan dana yang mereka miliki untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan.

Hubungan antara perusahaan dengan sektor politik merupakan hal yang perlu diperhatikan keberadaannya, hal ini dikarenakan dapat menjadi tantangan dalam melakukan penegakan terhadap kepatuhan pajak. Hubungan politik dianggap sebagai cara untuk melegitimasi penghindaran pajak. Padahal dalam kenyataannya hubungan politik dan tata kelola perusahaan merupakan dua hal yang berbeda. Tata kelola perusahaan yang baik penting dilakukan untuk

menjaga kredibilitas suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan pembayaran pajak merupakan dua cara umum untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta komunitas dengan menyediakan suatu produk. Hal ini sejalan dengan teori budaya perusahaan yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus menunjukkan perilaku yang baik dan benar.

Tanggung jawab sosial merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kegiatan bisnis perusahaan untuk berlaku etis. Memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Wardani & Purwaningrum, 2018). Dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku artinya perusahaan mendukung serta berkontribusi dalam rangka pembangunan negara kearah yang lebih baik serta berupaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mensejahterakan rakyat.

Apabila dilihat dari sudut pandang etika, motivasi diberlakukannya tanggung jawab sosial adalah untuk mengurangi praktik tidak bermoral seperti penghindaran pajak. Bentuk motivasi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Smith (2003) menurutnya terdapat dua jenis motivasi tanggung jawab sosial yakni normatif dan strategis. Motivasi normatif dilakukan dengan tujuan untuk mendorong seseorang atau perusahaan dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. Motif ini berbanding terbalik dengan motivasi strategis, dimana dalam motif

ini perusahaan berusaha untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk mencakup aktivitas-aktivitas untuk meraih keuntungan, semata untuk melindungi merk dan validitas suatu perusahaan. Berdasarkan pandangan strategis ini perusahaan menggunakan tanggung jawab sosial sebagai alat strategis untuk menyembunyikan kegiatan – kegiatan negatif seperti praktik penghindaran pajak.

Banyak literatur yang membahas tentang hubungan mendasar antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak yang berfokus pada negara maju. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian terhadap etika, namun permasalahan etika juga terjadi di negara-negara berkembang. Setiap tahunnya negara-negara berkembang mengalami kerugian antara 660-870 miliar euro karena aliran keuangan gelap (Rashid *et al.*, 2022). Menurut Global Financial Integrity, *Illicit financial flows* (IFF) merugikan negara berkembang sebanyak 20 persen dari nilai seluruh perdagangan mereka dengan negara-negara kaya (GFI, 2021). Karena besarnya kerugian yang dialami penting untuk mengetahui bagaimana sebuah perusahaan menangani penghindaran pajak dan apakah tanggung jawab sosial dapat menguranginya jika terdapat koneksi politik dibalikinya.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih banyak melakukan praktik penghindaran pajak karena beberapa alasan termasuk kemungkinan tertangkap yang relatif lebih rendah, paparan yang lebih baik

terhadap perubahan peraturan dimasa yang akan datang, kebebasan dari tekanan transparansi, serta biaya yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak (Kim & Zhang, 2016). Hubungan politik dianggap sebagai jaminan terhadap kejadian ekestrem seperti perencanaan pajak yang beresiko dan agresif. Keterkaitan politik dirasa memfasilitasi kemungkinan pelanggaran undang-undang perpajakan dimasa mendatang yang mendorong perencanaan pajak agresif (Young *et al.*, 2001).

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada prinsip gotong royong. Sejak tahun 1984, Indonesia telah mengadopsi sistem penilaian sendiri yang memberikan keyakinan pada wajib pajak agar memeriksa, menghitung, membayar, dan mengungkapkan pajak terhutang. Fungsi kedudukan yuridiksi pajak digunakan untuk menasehati, memperdalam atau mengontrol, mengawasi, serta menerapkan sanksi. Keberhasilan sistem pelaporan sendiri sangat bersangkutan dengan kesadaran dan peran masyarakat, oleh karena itu pengetahuan dan informasi harus saling berkaitan dan berkelanjutan. Otoritas perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus terus dibangun dengan membentuk lembaga keuangan yang akuntabel, ahli dibidangnya, dapat dipercaya, serta dalam pendistribusian penghasilan negara dapat dibuat secara adil dan merata.

Memberikan pemahaman tentang perpajakan diperlukan oleh otoritas perpajakan agar mampu mengkondisikan prosedur tentang perpajakan serta

menumbuhkan ketaatan dalam membayar pajak (Ruky *et al.*, 2018). Hal ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat mulai sadar terkait dengan peraturan perpajakan dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain memberikan pemahaman terkait dengan perpajakan, penggunaan sanksi perpajakan menjadi faktor yang dapat menumbuhkan ketaatan dalam seseorang menjalankan kewajibannya.

Penghindaran pajak merupakan tindakan korupsi. Secara sudut pandang luas melakukan tindakan korupsi pada uang negara baik secara pribadi maupun perusahaan dapat memberikan dampak negatif untuk perekonomian negara karena penghindaran pajak dapat menyusutkan pendapatan yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan meningkatkan taraf perekonomian negara. sanksi apabila melakukan penghindaran pajak dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi denda, tergantung jenis penghindaran pajak yang dilakukan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan pengaruh tanggung jawab sosial pada perusahaan sektor perbankan terhadap penghindaran pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Untuk mencegah terjadinya perhitungan maka digunakan juga variabel kontrol. pada penelitian ini variabel kontrol yang digunakan yakni ukuran perusahaan, Roa,

usia perusahaan, BIG4, biaya iklan, dan manfaat. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena bisa memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. ROA digunakan sebagai variabel kontrol karena dinilai dapat digunakan untuk melihat tingkat keuntungan perusahaan dari ROA perusahaan. Usia perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena semakin lama suatu perusahaan berdiri maka perusahaan tersebut akan melakukan efisiensi biaya salah satunya melalui pajak. Kualitas audit dipilih sebagai variabel kontrol karena kualitas audit dinilai dapat membantu klien untuk melakukan manajemen laba, sehingga dapat meringankan beban perusahaan. Biaya iklan digunakan sebagai variabel kontrol karena biaya iklan dinilai dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena citra yang dibuat sebuah perusahaan. *Leverage* dipilih sebagai variabel kontrol perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi dinilai dapat menimbulkan tekanan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agresif.

1.2 Rumusan Masalah

Proporsi penggunaan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentunya harus selaras dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun Penerimaan negara sektor jasa

keuangan dan asuransi mengalami penurunan dan hingga saat ini belum mampu mencapai realisasi penerimaan sebelum tahun terjadinya penurunan.

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Sehingga apabila terjadi penghindaran pajak maka akan memberikan dampak bagi negara. penelitian ini menggunakan variabel tanggung jawab sosial dan koneksi politik untuk melihat apakah kedua hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tingginya pendapatan pada sektor perpajakan dan realisasi penerimaan yang belum maksimal, maka perlu dilakukan untuk menguji faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab sosial mempengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah koneksi politik mempengaruhi hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan bagi perusahaan sektor perbankan, investor, dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan sektor perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga kedepannya perilaku ketidakpatuhan terhadap perpajakan dapat dihindari dan menjadi sebuah perusahaan yang patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait keinginan untuk menginvestasikan dana yang dimiliki pada sebuah perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sebuah investasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya terkait dengan faktor-faktor penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di sektor perbankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan terkait bagaimana penelitian tersebut disusun. Dalam penelitian ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I menjelaskan dan menguraikan tentang gambaran umum penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori dan konsep saat menyusun penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III dijelaskan dan diuraikan terkait bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV dijelaskan dan diuraikan tentang hasil dan pembahasan yang mendeskripsikan tentang objek penelitian, analisis data, serta intepretasi dari hasil dan pembahasan.

5. Bab V Penutup

Bab V penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian. Pada bagian ini diuraikan dan dijelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan selama melaksanakan penelitian, serta saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian.